Analisis PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah

Kusumastuti Marshanindita[1], Agus Budi Santosa[2]
[1,2] Universitas Stikubank, Indonesia
E-mail: kusumastutimarshanindita7004@mhs.unisbank.ac.id[1], agusbudi@edu.unisbank.ac.id[2]

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 01 Oktober 2026
Accepted: 26 Oktober 2026

Keywords: *PAD, DAU, DAK, BM, Economic Growth.*

Abstract: *Fiscal decentralization enables local governments to allocate public budgets more efficiently, thereby improving public service delivery, enhancing productivity, and promoting regional economic growth. Despite the implementation of fiscal decentralization, economic growth across the regencies and municipalities of Central Java has remained unstable in recent years. This study examines the effects of Local Own-Source Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and Capital Expenditure on Economic Growth in Central Java. This study employs a quantitative approach using panel data collected from 35 regencies and cities in Central Java over the 2015–2024 period. Total sampling was used in this study., and the data were analyzed using multiple linear regression.The results reveal that Local Own-Source Revenue (PAD) does not have a significant effect on economic growth. In contrast, the General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant effect on economic growth, while the Special Allocation Fund (DAK) has a negative and significant effect. Furthermore, Capital Expenditure has a positive and significant effect on economic growth.*

PENDAHULUAN

Desentralisasi berperan penting dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, dengan adanya desentralisasi mejadi salah satu sarana pemerintah daerah dengan tujuan untuk mempercepat pengelolaan daerah. Desentralisasi dapat membuat pemerintah daerah agar mengarahkan anggaran lebih efektif pada pelayanan publik, hingga terjadi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang ditunjukkan melalui meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi di suatu dapat membuat meningkatnya penerimaan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, grafik pertumbuhan ekonomi di beberapa tahun belakangan masih mengalami fluktuasi. Setelah mengalami kontraksi akibat COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian Jawa Tengah mulai pulih pada tahun 2021, meskipun laju

pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi itu memperlihatkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, usaha pemda dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dipengaruhi oleh kapasitas fiskal yang dimiliki. Sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari PAD, DAU, DAK serta belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal, semakin tinggi realisasi PAD yang dihimpun maka semakin besar pula fleksibilitas pemda dalam mengalokasikan anggaran pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur et al (2019) mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Ibrahim et al (2024) pendapatan daerah memungkinkan pendanaan proyek pembangunan dan infrastruktur serta peningkatan investasi di sektor produktif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun penelitian Tahu et al (2024) mengungkapkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Di samping PAD, pemerintah daerah juga mendapatkan anggaran TKD dari pemerintah pusat melalui DAU dan DAK. DAU bertujuan mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah yang mewujudkan pemda memiliki kemampuan cukup setara dalam penyediaan pelayanan publik. Pertiwi et al (2022) mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu Rosyidi dan Cahyono (2023) menyebutkan bahwa semakin besar DAU yang diterima, maka akan tinggi pula nilai Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah. Namun menurut Dini et al (2021) yang menjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sementara itu, DAK diberikan untuk memberikan dukungan pada program prioritas nasional yang menjadi kewenangan di pemerintah daerah, utamanya dalam lingkup pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. DAK terdiri atas dua jenis yaitu DAK-Fisik dan DAK-Non Fisik. Penelitian Ibrahim et al (2024) mengungkapkan bahwa DAK menunjukkan pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Ketika DAK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan dukungan terhadap berjalannya aktivitas ekonomi dan terciptanya lapangan kerja. Berbanding dengan penelitian Dini et al (2021) yang mengungkapkan bahwa DAK tidak mencerminkan pengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah dalam penyediaan asset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Nainggolan et al mengungkapkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Anggaran belanja modal apabila dialokasikan pada pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian akan meningkatkan produktivitas penduduk. Berbanding terbalik dengan Valentin R. G. (2024) yang mengungkapan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini akan menganalisis Pertumbuhan Eknomi di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa Tengah mengalami ketidakstabilan dalam kurun waktu 2015-2024. Pertumbuhan Ekonomi dipicu oleh beberapa faktor baik dari kemampuan daerah sendiri maupun bantuan dari Pemerintah berupa Dana Perimbangan.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Menurut Ateng (1985) otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian itu terwujud

sebagai sebuat pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Otonomi daerah juga merupakan hak mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hal tersebut ialah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan untuk memenuhi sebuah kepentingan bangsa. Pelaksanaan otonomi harus dilaksanakan sesuai dengan konsep otonomi yang dimaknai sebagai pelimpahan urusan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah**.**

Desentralisasi Fiskal

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Desentralisasi merupakan pendelegasian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi fiskal adalah bagian perkembangan dari desentralisasi dan mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan penyebaran kemampuan keuangan antar pemda yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. (Sun'an dan Senuk 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang dihasilkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan adanya PAD adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mencari sumber keuangan dalam menjalankan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentraslisasi (Yani, 2008). Mulai berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 diharapkan mampu memperkuat Pajak dan Retribusi Daerah dengan menyederhanakan sistem perpajakan dan retribusi daerah. Penelitian Anggraeni dan Rocmatullah (2024) serta Pertiwi et al (2022) menujukkan bahwa ada pengaruh positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Umum

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022, DAU adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan yang bertujuan menekan ketimpangan kemampuan fiskal dan layanan publik antar daerah. Sejak Tahun 2023 alokasi DAU mulai diberlakukan untuk 2 (dua) jenis DAU yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya *(Block Grant)* dan DAU yang ditentukan penggunaannya *(Spesific Grant).* Penelitian dari Rosyidi dan Cahyono (2023) serta Pertiwi et al (2022) mengungkapkan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus

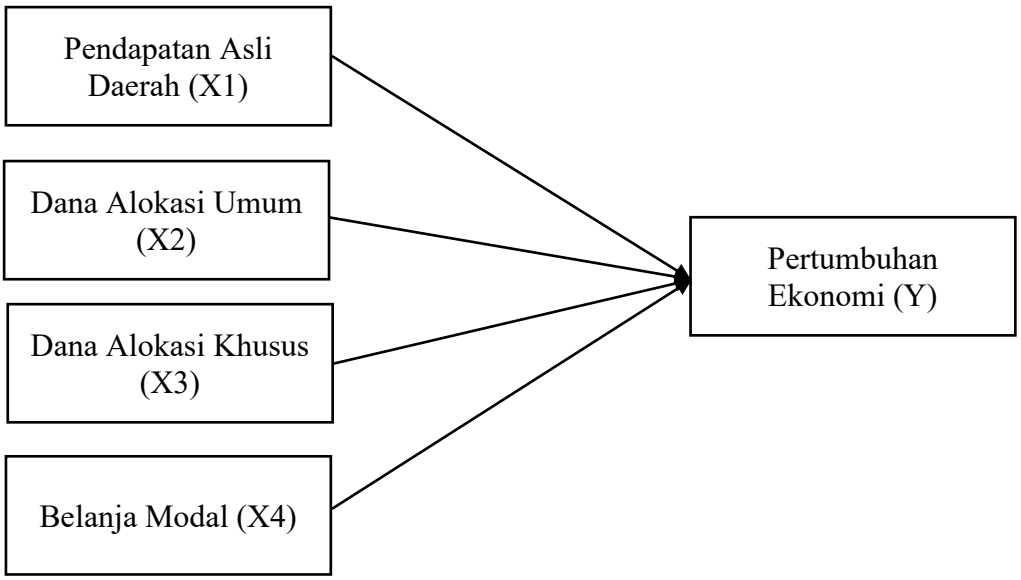
Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (UU No.1 Tahun 2022). DAK merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang diprioritaskan guna membiayai kebutuhan khusus di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur, layanan pendididan dan kesehatan. DAK terdiri atas DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah Kepada Daerah. DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. DAK nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Sedangkan hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung

pembangunan fisik/atau layanan publik daerah tertentu didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian sebelumnya oleh Qomariyahti & Hermanto (2017) dan Hutasuhut N. et al (2025) mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Modal

Merujuk pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal ialah pengeluaran anggaran yang dianggarkan untuk memperoleh asset tetap dan asset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Fungsi belanja modal adalah membiayai investasi dalam jangka panjang melalui pengadaan aset tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang (Mardiasmo, 2002). Hasil penelitian dari Marpaung et al (2021) dan Nainggolan et al (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kerangka penelitian ditampilkan dalam Gambar 1



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif sebagai sumber analisis. Data penelitian bersumber dari BPK terdiri atas laporan realisasi APBD dan dari BPS mencakup data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Periode pengamatan selama 10 tahun dari tahun 2015-2024. Metode penentuan sampel yaitu *sampling total,* dengan jumlah sampel sebanyak 350 sampel (35 Kabupaten/Kota x 10 tahun).

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk variabel tidak terikat (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan Data Panel yaitu menggabungkan

data *cross-section* dan *time series.*

Tabel 1. Defisnisi Operasinal Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Ukuran
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumber: Qomariyahti & Hermanto (2017)
2.	Dana Alokasi Umum	TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Sumber: Qomariyahti & Hermanto (2017)
3.	Dana Alokasi Khusus	TKD yang diberikan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan Pemerintah. Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Sumber: Qomariyahti & Hermanto (2017)
4.	Belanja Modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi Sumber: PP No. 12 Tahun 2019	Realisasi Total Belanja Mdoal Sumber: Qomariyahti & Hermanto (2017)
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi yaitu perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Sumber: Sukirno (2012)	Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$ Sumber: Qomariyahti & Hermanto (2017)

Teknik analisis data dimulai dengan memilih model regresi CEM/FEM/REM menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Selanjutnya model regresi akan melalui Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

STATISTIK DESKRIPTIF

Hasil statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	PAD	DAU	DAK	BM	PE
Mean	421.136.490.426	944.819.186.104	302.374.368.916	336.279.793.008	4.45
Median	347.939.952.299	946.285.911.000	314.789.630.826	306.021.753.531	5.29
Maximum	2.885.774.306.352	1.509.157.093.419	747.674.905.249	1.275.359.088.966	23.53
Minimum	152.044.596.332	400.176.755.000	3.750.100.000	51.980.727.019	-10.28
Std. Dev.	328.490.544.965	246.000.052.929	141.499.526.417	174.330.114.481	2.57
Obs	350	350	350	350	350

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Pada variabel PAD diperoleh nilai minimum adalah 152.044.596.332, nilai maksimum adalah 2.885.774.306.352, rata-rata adalah 421.136.490.426 dan standar deviasi adalah 328.490.544.965. Selanjutnya, variabel DAU diperoleh nilai minimum adalah 400.176.755.000, nilai maksimum adalah 1.509.157.093.419, rata-rata adalah 944.819.186.104 dan standar deviasi adalah 246.000.052.929. Selain itu variabel DAK diperoleh nilai minimum adalah 3.750.100.000, nilai maksimum adalah 747.674.905.249, rata-rata adalah 302.374.368.916 dan standar deviasi adalah 141.499.526.417. Variabel Belanja Modal diperoleh nilai minimum adalah 51.980.727.019, nilai maksimum adalah 1.275.359.088.966, rata-rata adalah 336.279.793.008 dan standar deviasi adalah 174.330.114.481. Terkahir untuk variabel PE diperoleh nilai minimum adalah -10.28, nilai maksimum adalah 23.53, rata-rata adalah 4.45 dan standar deviasi adalah 2.57.

PENGUJIAN KESESUAIAN MODEL REGRESI DATA PANEL

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	47.113463	4	0.0000
** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.			

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Hasil uji chow menunjukkan nilai Probalilitas F sebesar 0,0002, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model rgeresi yang diterima yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan penelitian dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

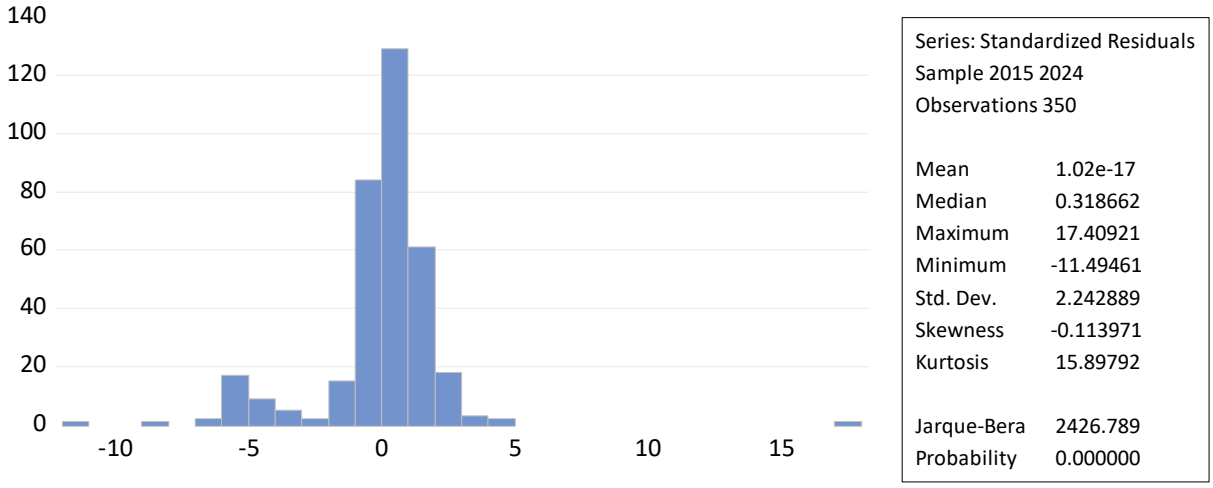
Cross-section F	2.044.525	(34,311)	0,0008
Cross-section Chi-square	70.605.374	34	0,0002

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Hasil Uji Hausman pada nilai probabilitas adalah 0.000, dimana nilai tersebut < 0.05. Maka model regresi yang sesuai untuk digunakan untuk penelitian ini yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Dikarenakan FEM terpilih menjadi model dalam Uji Chow maupun Uji Hausman, maka tidak perlu dilanjutkan dengan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Sehingga model FEM merupakan model yang terbaik, sehingga untuk melakukan regresi dapat menggunakan ***Fixed Effect Model*** **(FEM).**

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* adalah sebesar 0.000000, nilai tersebut < 0.05. Sehingga mencerminkan bahwa data dalam penelitian tidak berdistribusi normal. Meski data tersebut tidak berdistribusi normal namun data tersebut tetap dapat digunakan. Menurut Gujarati dan Porter (2009:99) bahwa saat ini masih terdapat banyak data *cross-section* dan *time series* yang memiliki jumlah observasi yang cukup besar. Oleh sebab itu, asumsi normalitas mungkin tidak terlalu penting dalam kumpulan data besar.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 07/08/26 Time: 08:55			
Sample: 2015 2024			
Included observations: 350			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	6469.475	401103.6	NA
PAD	0.784669	34517.87	2.078009
DAU	8.977510	421952.4	1.260906

DAK	0.134926	5775.953	2.189769
BM	0.237729	10296.31	1.169219

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat diketahui jika nilai *Centered* VIF antar variabel memiliki nilai kurang dari 10 atau *Centered VIF* < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolieritas antar variabel tidak terikat dalam model data panel dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas (*White Cross-Section)*

Dependent Variable: PE				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/26 Time: 09:01				
Sample: 2015 2024				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 350				
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f.corrected)				
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-435.2888	347.0385	-1.254295	0.2413
PAD	-0.392438	1.588535	-0.247044	0.8104
DAU	14.76668	11.39178	1.296257	0.2271
DAK	-0.815779	0.978436	-0.833758	0.4260
BM	2.461079	1.579378	1.558259	0.1536
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.238745	Mean dependent var		4.446714
Adjusted R-squared	0.145730	S.D. dependent var		2.570649
S.E. of regression	2.375966	Akaike info criterion		4.673402
Sum squared resid	1755.662	Schwarz criterion		5.103286
Log likelihood	-778.8454	Hannan-Quinn criter.		4.844511
F-statistic	2.566737	Durbin-Watson stat		1.968524
Prob(F-statistic)	0.000005			

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Setelah dilakukan Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan *White Cross Section* Nilai Probabiltas pada table 6 menujukkan hasil > 0.05. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat

bukti statistik adanya heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: PE			
Method: Panel Least Squares			
Date: 07/08/26 Time: 09:05			
Sample: 2015 2024			
Periods included: 10			
Cross-sections included: 35			
Total panel (balanced) observations: 350			
R-squared	0.238745	Mean dependent var	4.446714
Adjusted R-squared	0.145730	S.D. dependent var	2.570649
S.E. of regression	2.375966	Akaike info criterion	4.673402
Sum squared resid	1755.662	Schwarz criterion	5.103286
Log likelihood	-778.8454	Hannan-Quinn criter.	4.844511
F-statistic	2.566737	**Durbin-Watson stat**	**1.968524**
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Berdasarkan hasil tabel 7 bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.968524. Nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data sampai 100 dan variabel independent 4 (k=4) sehingga nilai dL = 1.7279 dan dU = 1.8094. Dengan demikian nilau Durbin Watson berada pada nilai dU < DW < 4-du atau 18094 < 1.968524 < 2.191 sehingga hasil tersebut menujukkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PE				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/08/26 Time: 09:05				
Sample: 2015 2024				
Periods included: 10				
Cross-sections included: 35				
Total panel (balanced) observations: 350				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.352.888	8.043.305	-5.411.815	0.0000
PAD	-0.392438	0.885816	-0.443025	0.6581
DAU	1.476.668	2.996.249	4.928.388	0.0000
DAK	-0.815779	0.367323	-2.220.875	0.0271
BM	2.461.079	0.487574	5.047.600	0.0000

R-squared	0.238745	Mean dependent var	4.446.714
Adjusted R-squared	0.145730	S.D. dependent var	2.570.649
S.E. of regression	2.375.966	Akaike info criterion	4.673.402
Sum squared resid	1.755.662	Schwarz criterion	5.103.286
Log likelihood	-7.788.454	Hannan-Quinn criter.	4.844.511
F-statistic	2.566.737	Durbin-Watson stat	1.968.524
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Berdasarkan Tabel 8 hasil analisis data panel dengan *fixed effect model,* terlihat bahwa variabel DAU (0.000), DAK (0.0271) dan BM (0.000) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pernyataan tersebut ditunjukkan dari nilai Probalitas yang nilainya lebih kecil dari 0.05. Sedangkan variabel PAD dengan nilai Probabiltas 0.6581 tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi yang dimana nilai Probabilitasnya lebih dari 0.05.

Uji *Adjusted R^2*

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.238745	Mean dependent var	4.446.714
Adjusted R-squared	0.145730	S.D. dependent var	2.570.649
S.E. of regression	2.375.966	Akaike info criterion	4.673.402
Sum squared resid	1.755.662	Schwarz criterion	5.103.286
Log likelihood	-7.788.454	Hannan-Quinn criter.	4.844.511
F-statistic	2.566.737	Durbin-Watson stat	1.968.524
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Mengacu pada hasil di atas dipada tabel 9, nilai adjusted R^2 adalah 0.145730, dengan demikian hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini, yaitu PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.145730 atau sebesar 14,57%. Hal ini mencerminkan bahwa besar presentase tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dapat diterangkan oleh keempat variabel independent sebesar 14,57% dan 85,43% diterangkan oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Penelitian

Tabel 10. Hasil Uji F

R-squared	0.238745	Mean dependent var	4.446.714
Adjusted R-squared	0.145730	S.D. dependent var	2.570.649
S.E. of regression	2.375.966	Akaike info criterion	4.673.402
Sum squared resid	1.755.662	Schwarz criterion	5.103.286
Log likelihood	-7.788.454	Hannan-Quinn criter.	4.844.511
F-statistic	2.566.737	Durbin-Watson stat	1.968.524
Prob(F-statistic)	0.000005		

Sumber: Hasil Olah Data, (2026)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menjukkan bahwa nilai *Probality (F-Statistic)* sebesar 0.000005 > 0.05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai *probability* menjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikasinya yaitu 0.05 atau 0.6581 > 0.05. Penelitian ini menjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien Regresi sebesar -0.392438 menjukkan ke arah negatif, dengan demikian H1 ditolak.

Hasil ini menjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Ketika terdapat peningkatan PAD menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi akan menurun, sebaliknya apabila PAD menurun maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat.

Rata-rata PAD yang dihasilkan terhadap Pendapatan Daerah hanya berkisar 18,76% selama 10 tahun terkahir. Sehingga perekonomian pada Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah tidak mengalami peninngkatan meskipun jumlah PAD yang diperoleh setiap tahunnya mengalami peningkatan karena kenaikan PAD belum meberikan kontribusi yang besar tehadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengelolaan dan peningkatan hasil pajak serta retribusi daerah di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah belum diimbangi dengan alokasi yang tepat sasaran.

Berdasarkan data 10 tahun terakhir menjukkan bahwa 97,14% Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Realisasi PAD lebih kecil dari Pendapatan Transfer. Hanya Kota Semarang yang menghasilkan PAD lebih tinggi dari Pendapatan Transfer. Selain itu presentase dukungan PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya 19% berbanding dengan Pendapatan Transfer yang menunjukan realisasi sebesar 67% dari Total Pendapatan Daerah. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa Pertumbuhan ekonomi lebih banyak didukung oleh Dana Transfer bukan dari Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Syam et al (2018) yang mengungkapkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Syam et al (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi realisasi PAD di suatu daerah, semakin mandiri daerah tersebut. Akan tetapi, terlepas dari besaran capaian PAD, jika terdapat inefisiensi dalam pengelolaannya, dana PAD tersebut akan terserap untuk pembiayaan operasional sehingga tidak memberikan dampak pada belanja modal untuk tujuan investasi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai *probability* sebesar 0.0000 menjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasinya yaitu 0.05 atau 0.000 < 0.05. Nilai ini menjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpegaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien Regresi sebesar 1.476668 menjukkan ke arah positif, sehingga H2 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar DAU telah digunakan sebagai belanja yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi. DAU yang disalurkan kepada pemda telah dialokasikan untuk membangun fasilitas penunjang pelayanan publik sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DAU adalah bagian dari TKD dan disalurkan kepada pemda sebagai instrumen pendukung kesetaraan kemampuan keuangan antar daerah guna mmperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

Melalui desentralisasi fiskal, DAU yang diterima oleh Pemeritah Daerah telah dialokasikan untuk belanja pembangunan yang mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat dan peningkatan PDRB seperti menjaga nilai konsumsi atau daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga pangan.

Hasil ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hutasuhut et al (2024) dan Azizah et al (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hutasuhut et al (2024) mengungkapkan bahwa Peningkatan Dana Alokasi Umum yang disalurkan kepada pemerintah daerah akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, dan pada gilirannya berdampak pada PDRB daerah. Sedangkan menurut Azizah et al (2020) menjelaskan bahwa Pengaruh positif dan signifikan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh fakta bahwa dana perimbangan DAU memiliki porsi terbesar dibandingkan komponen dana perimbangan lainnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai probability sebesar 0.0271 menjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasinya yaitu 0.05 atau 0.0271 < 0.05. Hal ini menjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpegaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai Koefisien Regresi sebesar -0.815779 menjukkan ke arah negatif, dengan demikian H3 ditolak.

Hasil ini menjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Ketika terjadi peningkatan DAK maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun, sebaliknya apabila DAK menurun maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan.

Hasil tesebut menunjukkan bahwa DAK adalah bagian dari Transfer Ke Daerah diaman sebagian kecil dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan sarpras untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Sebagian besar DAK yang ada pada pemda merupakan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah dan Tunjangan Profesi Guru. Dimana alokasi belanja tersebut merupakan belanja rutin berupa belanja pegawai dan barang/jasa.

Alokasi DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Hanya sebagian kecil dari alokasi DAK, terutama DAK-Fisik yang mengarah pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik seperti pembangunan jalan/jembatan dan sekolah. Diharapkan pemerintah akan lebih memprioritaskan pengalokasikan DAK untuk mendorong perekonomian di masyarakat dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini selaras dengan Azizah et al (2020) dan Nainggolan et al (2024) yang mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Azizah et al (2020) menyatakan bahwa DAK bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan memperbaiki

kondisi infrastruktur fisik yang dianggap sebagai prioritas nasional. Dampak negatif yang muncul akibat peningkatan jumlah DAK dapat disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama DAK adalah pemerataan pembangunan; dengan demikian, alokasi DAK akan lebih optimal jika disalurkan ke daerah-daerah yang lebih luas. Sedangkan menurut Nainggolan et al (2024) Dana Alokasi Khusus mempunyai peran dominan dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan serta perbaikan sarana prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai probability sebesar 0.0000 menjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasinya yaitu 0.05 atau 0.0000 < 0.05. Hal ini menjukkan bahwa Belanja Modal berpegaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien Regresi sebesar 2.261079 menjukkan ke arah positif, sehingga H4 diterima.

Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dialokasikan untuk penanganan infrastruktur pelayanan publik. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang baik, akan mempermudah mobilitas masyarakat yang mendukung perputaran roda perekonomian. Dengan meningkatkan infrastrukur dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada oleh Pemerintah Daerah maka akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal berfungsi sebagai stimulus utama dalam Pembangunan. Pengeluaran ini menciptakan asset fisik yang produktif seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum yang mempermudah mobilitas barang dan jasa. Apabila pemda mengalokasikan anggaran belanja untuk pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin maka kebijakan anggaran tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diteliti rata-rata total belanja modal yang berhubungan langsung dengan infrastruktur pelayanan publik adalah sebesar 70% dari total Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sama dengan yang ditunjukkan oleh Nainggolan et al (2024) dan Marpaung et al (2021) yang menjukkan hasil bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nainggolan et al (2024) menyatakan bahwa semakin besar alokasi belanja modal maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Marpaung et al (2021) mengungkapkan bahwa belanja modal membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila belanja modal naik, maka PDRB ikut meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PAD tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2024. Hal tersebut menjukkan bahwa semakin besar Pajak yang dibebankan kepada masyarakat justru akan membuat Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan. Beban pajak yang terlalu tinggi mengkibatkan perekonomian di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Apabila terdapat kebijakan peningkatan PAD seharusnya juga diimbangi dengan penyedian sarana prasarana yang meringankan beban masyarakat, seperti pada layanan umum transpotasi, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2024. Pemerataan kemampuan keuangan daerah melalui alokasi DAU kepada Pemerintah Daerah

ternyata mampu untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. Penggunaan DAU yang tepat dapat membantu perekonomian masyarakat. Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan Pendidikan dan Kesehatan yang bersumber dari DAU dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah;

3. Variabel DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2024. Alokasi DAK terdiri atas DAK-Fisik dan DAK-Non Fisik. Dalam penelitian ini menjukkan hasil bahwa apabila DAK mengalami peningkatan justru Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan. Sebagian besar alokasi DAK adalah DAK Non Fisik yang diperuntukan untuk Bantuan Operasional Sekolah dan Tunjangan Guru. Dimana alokasi tersebut tidak berkaitan langsung dengan Pertumbuhan Ekonomi;
4. Varibel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2024. Berdasarkan data penelitian menjukkan rata-rata 70% belanja modal yang berhubungan langsung telah dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah di Jawa Tengah telah memberikan sarana dan prasarana belanja modal seperti belanja modal jalan, jembatan dan bangunan bagi masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mempermudah akses maupun memperlancar perekonomian di Jawa

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam megelola keuangan daerah;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah lebih memprioritaskan belanja yang mendukung pada pertumbuhan ekonomi seperti menjaga kestabilan harga pangan, memperkuat daerah penghasil barang yang dapat di pasarkan di luar negeri dan mendorong investasi dalam negeri;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan lebih cermat dalam perhitungan alokasi belanja rutin, sehingga alokasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan sarana dan prasana publik dapat tersedia secara layak serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
4. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menambah periode data peneletian sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak.

DAFTAR REFERENSI

Adur, V. R. G., Apriyanto, G., & Sutriswanto. (2019). Impact of pure regional income (PAD), general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) toward capital expenditures and its impact on economic growth (Case Study of Local Government in Malang Area). *International Journal of Academic Research and Development*, 4(6), 10-19.

Adur, V. R. G. B. (2024). Analysis of the Influence of Local Original Income, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable in Regional Governments throughout Manggarai Raya in 2013-2023. *International Journal of Research in Social Science and Humanities,* 5(9), 53-66.

Alvaro, A., & Adhi, P. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget***,** 5(2), 103-120.

Anggraeni, R. D., & Rochmatullah, M. R. (2024). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah (Studi kasus Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 12-20.

Azizah, A., Sirojuzilam, S., & Fachrudin, K. A. (2020). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Fund Transfers on City Government Economic Growth in North Sumatra Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, *1*(4), 901-906.

BPS Provinsi Jawa Tengah. (2025, Feb 5). Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2024. Semarang. Retrieved from https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/1553/pertumbuhan-ekonomi-jawa-tengah-triwulan-iv-2024.html

Ibrahim, A., Srinita, S., & Nasir, M. (2024). The Effect of Local Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Poverty Through Economic Growth in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Finance*, Economics and Business, 3(3), 206-216.

Dini, S., Tarigan, E. A. B., & Siregar, M. N. A. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 65-80.

Gujarati, D. N. & Porter D. C. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition.* New York: McGraw-Hill/Irwin.

Hutasuhut, N., Yahya, I., & Erwin, K. (2025). Analysis of the effect of local own-source revenue, general allocation funds, special allocation funds, and village funds on economic growth with capital expenditure as a moderating variable in Regency/City of Sumatera. *International Journal of Research and Review*, 12(9), 621-637.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.

Marpaung, K., Takari, D., & Ompusunggu, C. D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Regional (JAKR)*, 16(2), 127-134.

Nainggolan, J., Masinambow, V. A. J., & Mandeij, D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi***,** 24(2), 1-12.

Pertiwi, D., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2022). The Effect Of Original Local Goverment Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, On Economic Growth With Capital Expenditure As A Moderating Variable In Regency And Cities In North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, *9*(7), 172-186.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Qomariyahti, N. D., & Hermanto, S. B. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA),* 6(11), 1-19.

Rosyidi, Aulia Khanza., Cahyono, Yuli Tri. (2023). The Effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund on Economic Growth with Capital

Expenditure as an Intervening Variable. *IJLRHSS: International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science*. 6 (4). 446-453.

Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2017). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Syafrudin, Ateng. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung: Bina Cipta.

Syam, A. Y., Lisandri, Rizani, F., & Oikawa, S. (2018). Influence Of PAD And DAU On Economic Growth With Capital Expenditure As An Intervening Variable On Regency And Municipal Government In South Kalimantan Province. *Journal Research and Analysis: Economy.*

Tahu, G. P., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., Menes, C. C., & Orbaningsih, D. (2024*).* The Influence of Regional Original Income and General Allocation Funds on Economic Growth with Capital Expenditures as an Intervening Variable. *Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA), 18*(6), 1-19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.